



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp4.273.196.368.879,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 285

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Sekretaris Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA

REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
I	Instalasi Pembangkit Listrik		
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sampit (2 x 25 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp259.677.771.375,00
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kota Baru (2 x 7 MW) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2010, 2011, 2012, 2013	Rp190.331.349.712,00

3. Pembangkit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Lapai 2 (2 x 2 MW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011, 2012, 2013	Rp14.021.036.832,00
Sub Jumlah Instalasi Pembangkit Listrik (I)			Rp464.030.157.919,00
II	Instalasi Gardu Listrik Induk		
1.	Gardu Induk 150 kV Blang Pidie (1x30 MVA) dan PLTU Meulaboh (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp32.390.876.183,00
2.	Gardu Induk 150 kV Kotacane (1x30 MVA) yang berlokasi di Provinsi Aceh dan Brastagi (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp27.921.534.508,00
3.	Gardu Induk 150 kV Salak (2x30 MVA) dan Sidikalang (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp33.627.920.098,00
4.	Gardu Induk 150 kV Subulussalam (1x30 MVA) yang berlokasi di Provinsi Aceh dan Sidikalang (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp29.894.079.524,00

5. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
5.	Gardu Induk 150 kV Pangurusan (1x30 MVA) dan Tele (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp34.040.892.972,00
6.	Gardu Induk 150 kV Penyabungan (1x30 MVA) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp2.341.358.360,00
7.	Gardu Induk 150 kV New Garuda Sakti (1x60 MVA) yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp20.140.556.946,00
8.	Gardu Induk 150 kV Teluk Kuantan (1x30 MVA) dan Rengat P. (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp22.505.941.687,00
9.	Gardu Induk 150 kV Kawasan Industri Dumai (1x30 MVA) dan Dumai (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp17.527.445.748,00
10.	Gardu Induk 150 kV Bagansiapiapi (1x30 MVA) dan Dumai (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp11.545.362.360,00

11. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
11.	Gardu Induk 150 kV Pasir Pangaraian (1x30 MVA) dan Bangkinang (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp35.963.993.995,00
12.	Gardu Induk 150 kV Pangkalan Kerinci (1x30 MVA) dan Pasir Putih (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp22.518.792.136,00
13.	Gardu Induk 150 kV Sarolangun (New) yang berlokasi di Provinsi Jambi hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp20.696.166.931,00
14.	Gardu Induk 150 kV Muara Bulian yang berlokasi di Provinsi Jambi hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp12.891.192.920,00
15.	Gardu Induk 150 kV Betung yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp13.113.914.995,00
16.	Gardu Induk 150 kV Sekayu yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp26.292.184.889,00

17. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
17.	Gardu Induk 150 kV Pagelaran yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp13.130.143.799,00
18.	Gardu Induk 150 kV Bukit Kemuning yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp12.741.040.899,00
19.	Gardu Induk 150 kV Manna yang berlokasi di Provinsi Bengkulu hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp14.151.194.299,00
20.	Gardu Induk 150 kV Cilegon Baru II yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp26.743.664.760,00
21.	Gardu Induk 150 kV Asahimas II yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp27.009.445.513,00
22.	Gardu Induk 150 kV Malimping yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp35.397.731.505,00

23. Gas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
23.	Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Kedinding yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp29.013.656.509,00
24.	Gardu Induk 150 kV Mantang yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2011, 2012, 2013	Rp36.109.686.371,00
25.	Gardu Induk 150 kV Tanjung yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2011, 2012, 2013	Rp33.541.412.151,00
26.	Gardu Induk 70 kV Taliwang yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2011, 2013	Rp19.506.570.120,00
27.	Gardu Induk 70 kV Nonohanis Extension yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2011, 2013	Rp479.728.575,00
28.	Gardu Induk 70 kV Kefamenanu Extension yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2012, 2013	Rp478.935.785,00

29. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
29.	Gardu Induk 150 kV Tayan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp10.803.287.759,00
30.	Gardu Induk 150 kV Bengkayang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp10.385.410.108,00
31.	Gardu Induk 150 kV Muara Teweh yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp39.868.596.183,00
32.	Gardu Induk 150 kV Buntok yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp19.872.350.247,00
33.	Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)/EMS RCC Kalselteng yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp48.830.820.964,00

34. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
34.	Gardu Induk 150 kV Petung yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp28.293.046.543,00
35.	Gardu Induk 150 kV Sembera yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp53.264.605.851,00
36.	Gardu Induk 150 kV Sengkang Extension yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2013, 2014	Rp8.888.979.000,00
37.	Gardu Induk 150 kV Siwa (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2013, 2014	Rp3.804.129.650,00
38.	Gardu Induk 150 kV Malili (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2013, 2014	Rp29.040.961.443,00

39. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
39.	Gardu Induk 150 kV Lasusua (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2013, 2014	Rp2.423.019.301,00
40.	Gardu Induk 150 kV Kolaka (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2013, 2014	Rp5.072.907.505,00
41.	Gardu Induk 150 kV Kendari (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2013, 2014	Rp14.158.623.627,00
42.	Gardu Induk 150 kV Unaaha (New) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2013, 2014	Rp27.912.002.288,00
43.	Gardu Induk 150 kV Negeri Dolok dan Galang (Ext.) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp33.226.192.221,00
44.	Gardu Induk 150 kV Kota Agung yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp26.315.973.487,00

45. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
45.	Gardu Induk 150 kV Lubuk Linggau (Ext. 2 LB arah tebing tinggi) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012	Rp8.898.045.041,00
46.	Gardu Induk 150 kV Pelabuhan Ratu Baru yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp10.884.141.926,00
47.	Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Surabaya Selatan yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp 116.225.444.751,00
48.	Gardu Induk 150 kV Tebing Tinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp25.890.907.220,00
49.	Gardu Induk 150 kV Gumawang yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp111.590.636.209,00
50.	Gardu Induk 150 kV Cimanggis II yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp36.624.527.568,00

51. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
51.	Gardu Induk 70 kV Labuhan/ Sumbawa yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2011, 2013	Rp20.084.734.690,00
Sub Jumlah Instalasi Gardu Listrik Induk (II)			Rp1.304.074.768.120,00
III	Instalasi Jaringan Transmisi		
1.	Jaringan Transmisi 150 kV Meulaboh - Blang Pidie yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp87.980.867.807,00
2.	Jaringan Transmisi 150 kV Brastagi - Kotacane yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp64.432.605.265,00
3.	Jaringan Transmisi 150 kV Galang - Negeri Dolok yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp28.694.364.765,00
4.	Jaringan Transmisi 150 kV Sidikalang - Salak yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp17.601.456.801,00

5. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
5.	Jaringan Transmisi 150 kV Incomer - Dolok Sanggul yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp11.672.902.551,00
6.	Jaringan Transmisi 150 kV Tele - Pangururan yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012	Rp4.979.901.392,00
7.	Jaringan Transmisi 150 kV Rengat - Teluk Kuantan yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp96.569.551.280,00
8.	Jaringan Transmisi 150 kV Dumai - Kawasan Industri Dumai yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012	Rp1.667.920.703,00
9.	Jaringan Transmisi 150 kV Dumai - Bagansiapiapi yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp41.365.305.801,00

10. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
10.	Jaringan Transmisi 150 kV Bangkinang - Pasir Pangaraian yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp54.109.241.576,00
11.	Jaringan Transmisi 150 kV Pasir Putih - Pangkalan Kerinci yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2011, 2012, 2013	Rp30.893.651.497,00
12.	Jaringan Transmisi 150 kV Muara Bulian - Sarolangun yang berlokasi di Provinsi Jambi hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp59.926.993.842,00
13.	Jaringan Transmisi 150 kV Betung - Sekayu yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp30.302.636.344,00
14.	Jaringan Transmisi 150 kV Pagelaran - Kota Agung yang berlokasi di Provinsi Lampung hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp43.983.919.510,00

15. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
15.	Jaringan Transmisi 150 kV Asahimas II Inc & Jaringan Transmisi 150 kV PLTU Cilegon - Cilegon Baru II yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp11.250.236.596,00
16.	Jaringan Transmisi 150 kV Malimping - Saketi yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2013	Rp15.912.105.757,00
17.	Jaringan Transmisi 150 kV Jatirangon Inc & Jaringan Transmisi 150 kV Cimanggis II Inc yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012	Rp13.055.276.690,00
18.	Jaringan Transmisi 70 kV Bonto - Bima - Dompu yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2009, 2010, 2011, 2012, 2013	Rp78.871.451.757,00
19.	Jaringan Transmisi 70 kV Sumbawa - Tano - Taliwang yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2013	Rp28.351.160.075,00

20. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
20.	Jaringan Transmisi 70 kV Atapupu/Atambua - GI Atambua - Kefamenanu yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2009, 2010, 2011, 2012, 2013	Rp136.409.154.276,00
21.	Jaringan Transmisi 70 kV Nonohanis - Kefamenanu yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara)	2011, 2012, 2013	Rp19.683.965.680,00
22.	Jaringan Transmisi 150 kV Sampit - Pangkalan Bun yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp217.451.437.500,00
23.	Jaringan Transmisi 150 kV PLTU Sampit (Perpres) - Incomer yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp60.956.485.080,00
24.	Jaringan Transmisi 150 kV Buntok - Muara Teweh yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp148.348.792.501,00

25. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
25.	Jaringan Transmisi 150 kV Tanjung - Buntok yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, 2013	Rp122.596.107.207,00
26.	Jaringan Transmisi 150 kV Silae - Pasangkayu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2012, 2013	Rp36.193.922.948,00
27.	Jaringan Transmisi 150 kV Sengkang - Siwa yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2012, 2013	Rp35.271.435.603,00
28.	Jaringan Transmisi 150 kV Siwa - Palopo yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2012, 2013	Rp48.634.753.069,00
29.	Jaringan Transmisi 150 kV Wotu - Malili yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011, 2012, 2013	Rp22.223.187.572,00

30. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
30.	Jaringan Transmisi 150 kV Malili - Lasusua yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011, 2012, 2013	Rp82.410.608.851,00
31.	Jaringan Transmisi 150 kV Lasusua - Kolaka yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011, 2012, 2013	Rp101.740.816.144,00
32.	Jaringan Transmisi 150 kV Kolaka - Unaaha yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011, 2012, 2013	Rp61.411.927.758,00
33.	Jaringan Transmisi 150 kV Unaaha - Kendari yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011, 2012, 2013	Rp42.337.234.285,00
34.	Jaringan Transmisi 150 kV Payakumbuh - Garuda Sakti yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012	Rp250.282.833.176,00

35. Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
35.	Jaringan Transmisi 150 kV Linggau - Tebing Tinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012	Rp27.258.693.929,00
36.	Jaringan Transmisi 150 kV Lahat - Muara Enim - Gumawang yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2011, 2012, 2013	Rp299.798.327.981,00
37.	Jaringan Transmisi 150 kV PLTGU Pelabuhan Ratu - Pelabuhan Ratu Baru yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp32.719.988.959,00
38.	Jaringan Transmisi 150 kV Jatiluhur Baru Inc & Jaringan Transmisi 150 kV Kadipaten Inc yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp20.109.523.036,00
39.	Jaringan Transmisi 150 kV Ampenan - Tanjung yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, 2013	Rp17.630.697.276,00

Sub . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Sub Jumlah Instalasi Jaringan Transmisi (III)		Rp2.505.091.442.840,00
	Jumlah		Rp4.273.196.368.879,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Wanna Djaman